



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI MULYANI INDRAWATI**
2. Jabatan : **MENTERI KEUANGAN**
3. NHK : **35749**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 45.811.090.623

1. Tanah dan Bangunan Seluas 922 m2/400 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/89 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 1.496.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Bangunan Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Bangunan Seluas 142.4 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.463.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 414.16 m2/414 m2 di NEGARA ---, HASIL SENDIRI Rp. 18.648.090.623
9. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 680.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 804.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/295 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 145.000.000

1. MOTOR, HONDA REBEL CMX500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 446.520.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 12.721.023.556

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.140.815.666

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 67.264.449.845

III. HUTANG

Rp. 9.215.670.562

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 58.048.779.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.